**ANALISISPENGELOLAANDANADESADIDESANEGARABATIN KECAMATANJABUNGKABUPATENLAMPUNGTIMUR**

***ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN BATIN STATE VILLAGE, JABUNG DISTRICT, LAMPUNG TIMUR DISTRICT***

**Muhammad Gunawan1, Rochmad Bayu Utomo, S.E., M.Si., Ak., CA2**

12Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

1muhammadgunawan@gmail.com, 2bayu@mercubuana-yogya.ac.id

**Abstrak**

Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan keuangan desa yang baik ada beberapa hal kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban dengan selanjutnya permasalahan dari data skripsi inilah adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa

Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

Metode penelitian di lakukan menggunakan data primer dan sekunder yang selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif. Adapun kekurangan dalam melakukan pengelolaan yaitu dibagian Penatausahaan dan dibagian Pertanggungjawaban. Kurangnya dalam Penatausahaan dimana tugastugas yang harus dilakukan oleh bendahara desa tetapi dilaksanakan oleh sekretaris desa, dalam melaksankan Pertanggungjawaban aparatur desa masih belum bisa malaksanakan transfaransi kepada masyarakat.

# Kata kunci : Pengelolaan Dana Desa

## Abstract

*Desa Negara Batin, Jabung Subdistrict, East Lampung Regency in managing village funds to realize good village finances, there are several activities including planning, implementing, administering, reporting, and accountability with the subsequent problems of this thesis data is to find out the management of village finances in the village Negara Batin Jabung District, East Lampung Regency.*

*The research method was carried out using primary and secondary data which were then processed descriptively qualitatively. The shortcomings in carrying out management are in the Administration and in the Accountability section. Lack of Administration where the tasks that must be carried out by the village treasurer but carried out by the village secretary, in carrying out the accountability of the village apparatus are still unable to carry out transparency to the community.* ***Keywords: Village Fund Management***

# PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sudah saatnya desa sebagai unit pemerintahan terkecil mengambil peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan telah dimulai dari setiap unit desa tersebut maka tujuan tercapainya pembangunan yang adil dan merata akan lebih mudah terwujud. Dengan dana desa yang di kelola sebaik mungkin diharapkan tidak hanya mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi juga mampu menyelenggarakan pelayanan desa dengan baik serta dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan tertib. Sumber Dana desa sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.

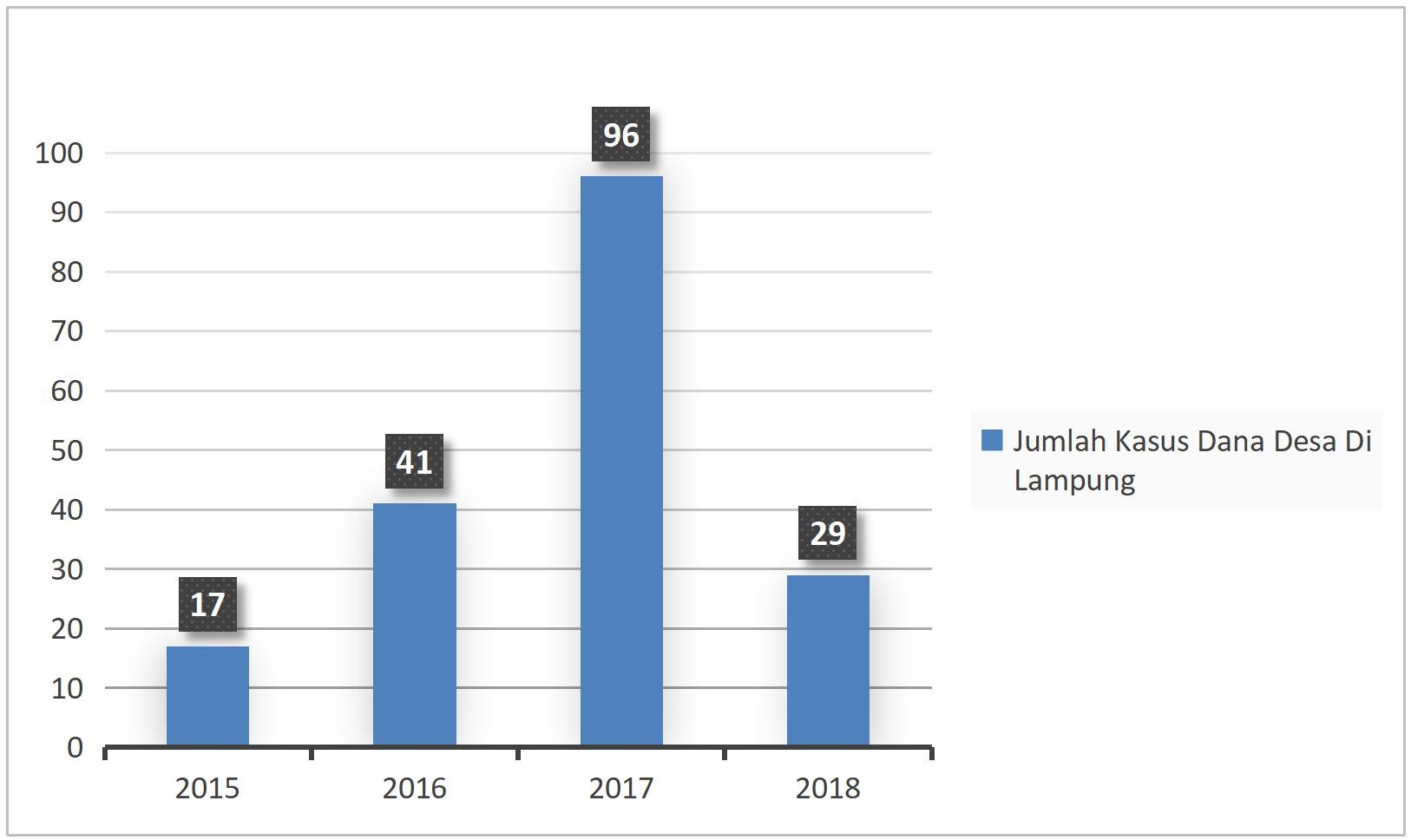
Pemanfaatan dana desa juga untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Warsita, dkk (2017) Menjelaskan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain dana desa yang bersumber dari APBN, sebenarnya desa memiliki sumber-sumber lain yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa seperti pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil *asset*, swadaya, dan lain-lain).

Pemerintahan Daerah telah memberikan kebijakan pengakuan keragaman pada lokalitas, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya desentralisasi dan demokrasi desa, meskipun fokus otonomi daerah masih diletakkan di Kabupaten/Kota. Desentralisasi pada dasarnya melibatkan adanya transfer terhadap kewenangan politik, administrasi, dan keuangan dari pemerintah pusat kepada lembaga pemerintah daerah atau dibawahnya. Transfer tersebut menghendaki adanya kedudukan yang hierarkis di antara tingkat pemerintahan daerah. Secara normatif desa tidak lagi dipandang sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah kecamatan, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Dengan adanya otonomi daerah, maka seluruh provinsi baik kota dan kabupaten dituntut untuk mengelola dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih akuntabel, transparan dan partisipatif dalam penggunaan laporan keuangan.

Menurut Sunarti, dkk (2018) Pengeloalaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban keuangandesa. Penyelenggaraan keuangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangaan lokal bersekala desa di danai oleh APBDes. Hal yang mengenai keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Tahap perencanaan, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Pengelolan keuangan desa telah memberikan landasan pada otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif oleh karna itu, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengengaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan mentri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, Sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkanya secara transparan serata dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Berdasarkan UU no 6 tahun 2014 tentang desa, keberadaan dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, sarana ekonomi misalnya pasar, sarana sosial seperti klinik, serta meningkatkan keampuan berusaha masyarakat desa. Namun dalam perkembangannya dana desa yang berlimpah tersebut ternyata rawan dari praktik korupsi. Berdasar hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 2015 hingga semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, berikut diuaraikan pada Gambar 1.1.



Sumber : portallampung.co

Jumlah Kasus Dana Desa Di Lampung

Gambar 1.1

Diketahui pada tahun 2017 jumlah kasus korupsi dana desa di lampung mencapai 96 kasus dan merupakan jumlah tertinggi dari kurun waktu empat tahun dalam penelitian ICW meskipun pada tahun 2018 sempat menurun menjadi 29 kasus akan tetapi menurut keterangan lebih lanjut dari peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha hal tersebut hanya merupakan data di semester 1 di tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, Shuha (2018) menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung berupa sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDes, internet dan pemahaman masyarakat.

Liando, dkk (2017) menyatakan pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai untuk pembuatan laporan pertanggungjawabanya di karenakan dengan beberapa kendala seperti sumber daya manusia yang ada di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa umurnya tergolong rendah, Faktor pendidikan dari aparatur permerintah desa yang ada di tingkat desa tergolong rendah, faktor usia perangkat desa yang menyebabkan lambannya pengoprasian komputer, Banyaknya uraian kode rekening yang harus dihafalkan, kurang memahaminya aparat desa mengenai teknis pembuatan pelaporan pertanggungjawaban. Hal ini juga di perkuat dengan hasil penelitian Nurul Hidayah, dkk (2017) Pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal petanggungjawaban administrasi keuangan masih perlu ditingkatkan kedisiplinan oleh pengelolaa keuangan Desa.

# RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan dana desa Negara Batin.
2. Bagaimana pelaksanaan dana desa Negara Batin.
3. Bagaimana penatausahaan dana desa Negara Batin.
4. Bagaimana pelaporan dana desa Negara Batin.

**TINJAUAN PUSTAKA**

# Desa

Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepintingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan hak tradisional yang diakui dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupu n pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Pemerintahan desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

# Otonomi Desa Terhadap Pengelolaan APBDesa

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan UU tentang pengembalian tataran mengenai jati diri desa yang dikembalikan lagi kepada asalusulnya. UU ini juga menggambarkan itikad negara untuk memberikan kemandirian kepada pemerintahan desa. Sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan desa yang mengatur diri sendiri. Hal yang perlu diperhatikan, desa merupakan tatanan pemerintahan yang kecil di setiap daerah yang telah ada bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat. Reformasi ini untuk mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.

# Pemerintah Daerah danAPBD

1. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang desa. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana ada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan sumbersumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaranpengeluaran tersebut (Halim,2008: 20).

1. Pelaksanaan APBDesa

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti harus dapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan 30 sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Dalam pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa

Bentuk APBD yang pertama didasari oleh keputusan mentri dalam negri (Kepmendagri)

Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sejalan dengan perubahan, APBD sekarang ini didasari pada peraturan mentri dalam negri (permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, dalam brntuk baru APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim, 2008: 23). Mahsun (2015: 83) menyatakan struktur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), terdiri dari :

* 1. Pendapatan

Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan diakui saat diterima pada rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Abdul Halim (2008: 96), menambahkan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dibedakan menjadi empat, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

* 1. Belanja

Terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening umum daerah atau entitas.

Noerdiawan (2007: 43) menyatakan bahwa Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkanpelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

# Peraturan Tentang Pengelolaan Dana Desa

a. PengelolaanKeuanganDesaBerdasarkanUndang-Undang Nomor 6 Tahun2014

Pasal 1 angka 10 dan Pasal 71 ayat (1) UU No. 6/2014 menyebutkan: “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.

Pada Pasal 71 ayat (2) UU No. 6/2014 disebutkan: “Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa”. Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) diatas terdiri dari:

1. Pendapatan asli Desa;
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

Kabupaten/Kota;

1. Alokasi anggaran dariAPBN;
2. Bantuan keuangan dari APBD Provinsidan APBD Kabupaten/Kota; 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
   1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Demikian halnya dengan APBD dalam uraian diatas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka APBDesa juga memiliki Pedoman pengelolaan keuangan desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

* 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2007

Sesuai dengan pedoman undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri nomor 113 Tahun 2014, setiap pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerahnya sebagai kebijakan politis dalam rangka mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang dibuat sesuai dengan keperluan dan managemen daerah masing-masing. Demikian pula yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam upaya tersebut menerbitkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

# METODE Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif evaluatif, dimana peneliti lebih memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat pernyataan dari informan dan perilaku yang diamati

# Lokasi Penelitian

Objek tempat penelitian adalah di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang sedang berkembang dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

# Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian merupakan merupakan wilayah yang ingin di teliti oleh peneliti. Seperti menurut Sugiyono (2011 : 80) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.” Pendapat di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian di Desa Negara Batin dan sumbyeknya sebagai berikut :

1. Kepala Desa Negara Batin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
2. Sekretaris Desa Negara Batin yang membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa,
3. Bendahara Desa Negara Batin sebagai penatausahaan pengelolaan keuangan desa.
4. Masyarakat Desa Negara Batin

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2011:81) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada.

# Jenis Data dan Sumber Data

Pengertian sumber data dalam penulisan ini adalah subyek dari mana data yang diperoleh (Suharsimi, 2013;172). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari ungkapan narasumber ketika wawancara, buku dan dokumentasi berupa foto. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan yakni sumber data perimer dan sumber data skunder.

1. Data Primer

Menurut Sanusi (2014: 104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data, mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibituhkan data tersebut dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBDes di Desa Negara Batin.

1. Data Sekunder

Data Skunder menurut Sanusi (2014: 104) merupakan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah desa Negara Batin.

# Teknik Pengumpulan Data

Menurut Faridah (2015), Dalam penelitian kualitatif menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Observasi (observation) berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti (Haris,2010;131). Dalam hal ini mengandung arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Observasi adalah penelitian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu (Emzir, 2010; 28)

1. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara memegang peran penting karena digunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan seseorang lainnya memberikan informasi (Noerdiawan, 2010: 180).

1. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa data-data tentang dana desa, foto, laporan kegiatan, serta segala bentuk dokumentasi yang merekam wawancara antara peneliti dengan perangkat desa.

# Teknik Sampling

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Secara umum, sampel merupakan bagian dari populasi. Namun, penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang terjadi dari suatu populasi, melainkan sampel yang diambil ditentukan peneliti secara sengaja dengan mempertimbangkan keterkaitan informasi dan kondisi lingkungan terhadap topik yang diteliti. Pada penelitian kualitati, pertimbangan pemilihan sampel tidak berdasarkan keterwakilan populasi dalam sampel, namun berdasarkan kemampuan sampel dalam memberikan informasi selengkap mungkin kepada peneliti (Alfindasari, 2014). Sehingga sampel dalam penelitian tidak dinamakan responden, tetapi disebut sebagai narasumber, partisipan atau informan suatupenelitian.

# Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian mengacu pada 3 (tiga) langkah. Menurut Sekaran dan Bougie (2016) “…, *the are generally three steps in qualitative data analysis : data reduction, data display, and the drawing of conclusion”*.

Proses analisis data menurut Sekaran dan Bougie (2016) yaitu meliputi *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan d*rawing conclusion* (penarikan kesimpulan).

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 (5), “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Keuangan desa terdiri dari pendapatan dan belanja desa. Proses pengelolaan dana desa dengan keuangan desa lainnya, yaitu dimulai dari perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pealaporan dan Pertanggung jawaban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah aparat desa dalam melakukan pelaksanaan pengelolaaan mengetahui peraturan dalam pengelolaan dana desa. Sehingga dalam melaksanakan pengelolaan dana desa tersebut menjadi efissien. Adapun analisis data hasil wawancara diuraikan sebagai berikut.

1. Perencanaan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator Perencanaan Permendagri Nomor 113  Tahun 2014 | Ada | Tidak ada |
| Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. | √ |  |
| Sekretaris Desa menyampaikan rancangan  PeraturanDesa tentang APBDesa kepada KepalaDesa | √ |  |
| Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. | √ |  |
| Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahunberjalan. | √ |  |
| Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. | √ |  |

1. Pelaksanaan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 | Ada | Tidak ada |
| Tahun 2014 |  |  |
| Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. | √ |  |
| Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana  AnggaranBiaya. | √ |  |
| Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. | √ |  |
| Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan. | √ |  |
| Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:   1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenisbelanja; 2. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 3. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;   dan/atau   1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang   berkepanjangan;   1. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan   Pemerintah Daerah. | √ |  |

1. Penatausahaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator Penatausahaan Permendagri Nomor 113 | Ada | Tidak ada | |
| Tahun 2014 |  |  |  |
| Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. | √ |  |  |
| Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. |  |  | √ |
| Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. |  | √ |  |
| Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya | √ |  |  |
| Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:   1. Buku kas umum; 2. Buku Kas Pembantu Pajak;dan 3. Buku Bank. | √ |  |  |

1. Pelaporan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator Pelaporan Permendagri Nomor 113  Tahun 2014 | Ada | Tidak ada |
| Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada  Bupati/Walikotaberupa:   1. Laporan semester pertama; dan 2. Laporan semester akhir tahun. | √ |  |
| Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa. | √ |  |
| Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahunberjalan. | √ |  |
| Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun | √ |  |
| berikutnya. |  |  |

1. Pertanggungjawaban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator Pertanggungjawaban Permendagri  Nomor 113 Tahun 2014 | Ada | Tidak ada |
| Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. | √ |  |
| Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan PemerintahanDesa. | √ |  |
| Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses olehmasyarakat. |  | √ |
| Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. |  | √ |
| Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal  38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. | √ |  |
| Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana  Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. | √ |  |

# KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dalam melaksanakan perencanaan, Desa Negara Batin telah melakukan dengan baik dan sudah cuukup sesuai dengan peraturan yang telah ada.

1. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pelaksanaan, Desa Negara Batin sudah melaksanakan semua anggaran yang telah dianggarkan tanpa ada yang belum dilaksanakan.

1. Penatausahaan

Dalam melaksanakan Penatausahaan, Desa Negara Batin belum cukup optimal dalam malaksanakannya entah ketidaktauan tentang peraturan yang ada atau memang disengaja.

1. Pelaporan

Dalam melaksanakan pelsporan, Desa Negara Batin sudah cukup baik dalam melakukan pelaporan

1. Pertanggungjawaban

Dalam Melakukan Pertanggungjawaban, Desa Negara Batin Belum cukup baik karna masih belum adanya transparansi dengan masyarakat entah perangkat desa yang tidak mengetahui atau memang disengaja.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal-hal yang belum cukup baik dalam pengelolaan tersebut yaitu, dengan pengembangan sistem seleksi perangkat desa, meningkatkan tingkat pendidikan, dan pelatihan perangkat desa sehingga dalam pengelolaan dana desa menajdi lebih efisien.

*.*

# DAFTAR PUSTAKA

Alfindasari, Dessy. 2014. *Teknik Sampling Pada Penelitian Kualitatif*. Diterima dari http://www.eurekapendidikan.com/2014/11/teknik-sampling pada penelitian.html. Diakses pada tanggal 5 November 2019.

Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

DPR RI. (2014). *Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*

*Tentang Desa.* Melalui:

<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf>

Editor Portal Lampung (2019). *YLHBR Soroti Dugaan Korupsi Dana Desa di Tulang Bawang Barat melalui:* [*https://portallampung.co/daerah/ylhbr-soroti-dugaan-korupsi*](https://portallampung.co/daerah/ylhbr-soroti-dugaan-korupsi-dana-desa-di-tulang-bawang-barat/)*dana-desa-di-tulang-bawang-barat/*

Emzir M, *Metofologi Penulisan Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Pers.

Faridah &Suryono Bambang. (2015). *Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa*. Jurnal Ilmu &

Riset Akuntansi, Vol. 4, No 5.

Halim Abdul. (2008) . *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : SalembaEmpat.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika.

Hidayah Nurul, Iin Wijayanti. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.*Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 2 Edisi 1 September 2017.

I Gusti Putu Geria Warsita W., Ni Luh Prasetiani Agustini, Ni Kadek Ayu Widia, Ni

Nyoman Dewi Diah Kumalawati (2017). *Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Desa Terhadap Laporan Keuangan Desa Tua Marga Tabanan.* Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 7 No. 3, Desember 2017

Leonardo, Y. L., Linda, L., Heince, R. N.W. (2017). *Analisis Pengelolaan dan*

*Pertanggung Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kolongan*

*Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa.* Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 1474 –1483

Mahsum Moh, Sulistyowati Firma, Heribertus A.P. (2015). *Akuntansi SektorPublik*. Yogyakarta: BPFE

Moleong, L. (2012) .*Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nordiawan Deddy, Iswahyudi S.P, Maulidah R. (2007). *Akuntansi Pemerintah.* Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014

Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006

Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. (2010). *Metodologi Peneleitian Pendekatan Praktis*

*Dalam Penelitian.* Yogyakarta : Andi

Sanusi, A. (2014). *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2016. *“Research Methods for Business: A Skill Building Approach”. Seventh Edition.* United Kingdom: John Wiley & Sons.

Shuha, Khalida. 2018. “*Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi KAsus pada Desa-Desa selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman*)”. Artikel. Digital Library Universitas Negeri Padang.

Sugiyono. (2010). *Metode penelitian bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)*.

Bandung: Alfabeta.

Sunarti Nyoman, Ni Nyoman Yunita Lestari, Putu Purnama Yanti, Luh Gede Widya

Asty D, Uzlifah, Ni Komang Leli Mayuni. (2018). *Peengelolaan*

*Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung.* Jurnal Ilmiah Akuntansi danHumanika, Vol. 8 No. 1, April 2018.

Undang-undang No 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.